



LAPORAN

PENERIMA MANFAAT INOVASI "SITANJAK" 2023 - 2024



BPKPD

Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah

www.bpkpd.natunkab.@go.id

LAPORAN PENERIMA MANFAAT INOVASI "SITANJAK"

SISTEM INFORMASI MONITORING HASIL TINDAK LANJUT TEMUAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
Tahun 2024

1. PENDAHULUAN

Inovasi "SITANJAK" (Sistem Informasi Monitoring Hasil Tindak Lanjut Temuan) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Natuna melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan inovasi tersebut, khususnya terkait dengan dampak dan penerima manfaat secara langsung dan tidak langsung.

2. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi pihak-pihak yang telah menerima manfaat dari penggunaan SITANJAK.
- Menggambarkan bentuk manfaat yang diperoleh dari inovasi ini.
- Memberikan dasar evaluasi dan pengembangan inovasi ke depan.

3. SASARAN DAN PENERIMA MANFAAT

a. Sasaran Inovasi

- OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Daerah).
- Pimpinan Daerah dan DPRD.
- Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak langsung.

b. Jumlah Penerima Manfaat Langsung (2023/2024)

No	Unit/Instansi Pengguna	Jumlah Pengguna	Keterangan
1	OPD (seluruh SKPD)	38	Aktif menggunakan dashboard SITANJAK
2	Inspektorat Daerah	15	Penginput dan pengawas data tindak lanjut
3	BPKPD	10	Monitoring progres penyelesaian temuan
4	Sekretariat Daerah	5	Pengambilan kebijakan strategis
	Total	68 orang	

c. Penerima Manfaat Tidak Langsung

- Masyarakat umum
- DPRD
- Auditor eksternal (BPK)

4. BENTUK MANFAAT YANG DIPEROLEH

No	Jenis Manfaat	Uraian Singkat
1	Efisiensi waktu	Proses monitoring dan pelaporan lebih cepat dibanding manual.
2	Akurasi data	Data temuan dan status tindak lanjut lebih akurat dan terpusat.
3	Transparansi	Monitoring progres OPD secara real-time oleh pimpinan dan auditor.
4	Peningkatan kepatuhan	OPD terdorong menyelesaikan temuan lebih cepat.
5	Dasar pengambilan keputusan	Informasi kredibel untuk intervensi strategis pimpinan.

5. TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA

Hasil survei internal kepada 68 pengguna menunjukkan bahwa:

- 82% menyatakan puas dengan kemudahan penggunaan.
- 76% menyatakan sangat terbantu dalam pelaporan tindak lanjut.
- 88% menyatakan sistem ini lebih baik dibanding cara manual sebelumnya.
- 12% menyarankan peningkatan tampilan dan notifikasi otomatis.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Inovasi SITANJAK telah memberikan manfaat nyata dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem ini telah menjangkau seluruh OPD dan menjadi alat bantu penting bagi pengawasan internal daerah.

6.2 Rekomendasi

- Peningkatan kapasitas SDM OPD dalam penginputan data.
- Penambahan fitur notifikasi dan grafik real-time.
- Penguatan regulasi internal untuk kewajiban penggunaan SITANJAK.

Lampiran

- Data pengguna aktif SITANJAK.
- Tampilan dashboard sistem.
- Grafik progres penyelesaian temuan.



Ranai, 6 Januari 2025
Kepala BPKPD

SURYANTO, SE.,MA
NIP. 197709122000121004

DAFTAR PENERIMA MANFAAT INOVASI SiTANJAK

I. PENERIMA MANFAAT

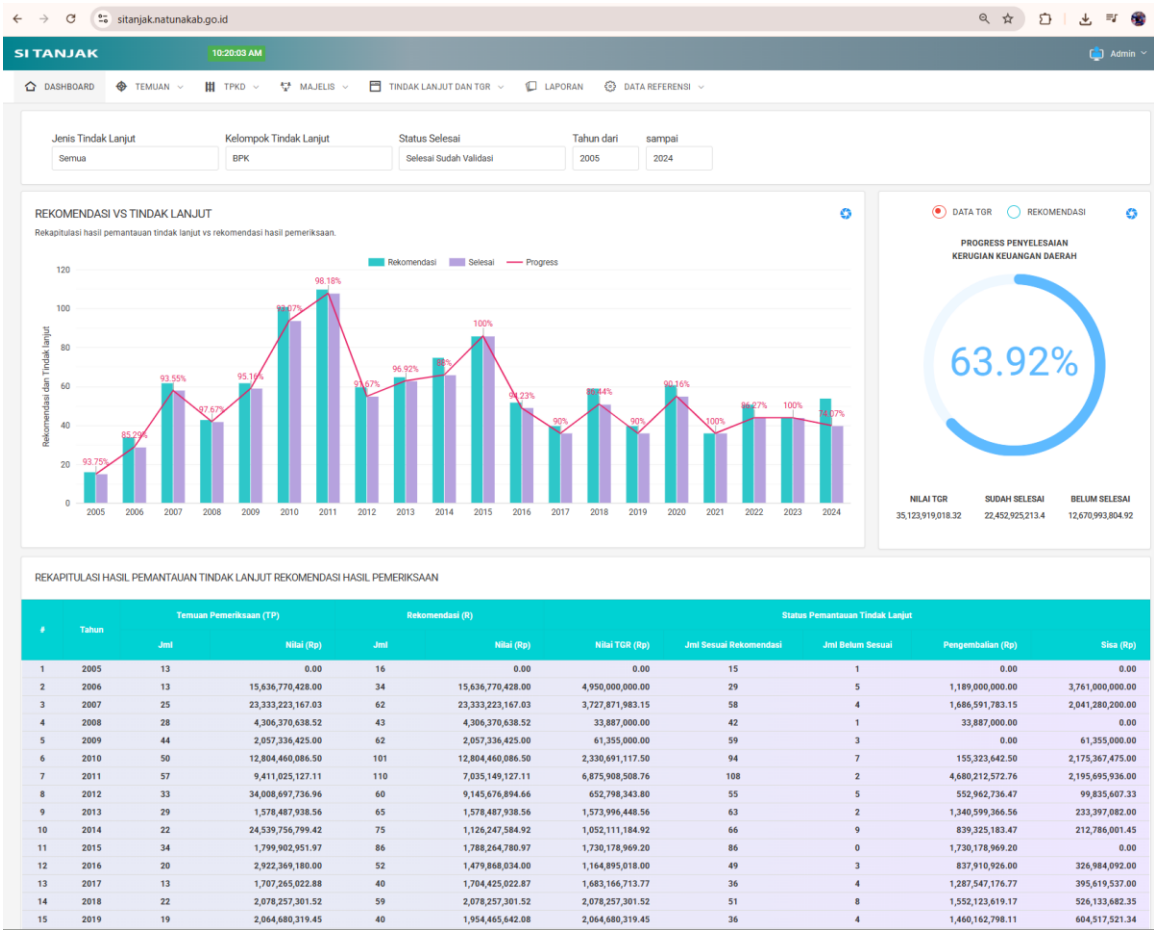
a. PENERIMA MANFAAT LANGSUNG

No	Nama SKPD	Jumlah pengguna	Keterangan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	
2	Dinas Ketahanan Pangan	2	
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	2	
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	
6	Dinas Perikanan	2	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	
8	Dinas Pariwisata	2	
9	Dinas Kesehatan	2	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	2	
11	Dinas Perhubungan	2	
12	Dinas Lingkungan Hidup	2	
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	
15	Dinas Sosial	2	
16	Dinas Pertanian	2	
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan KB	2	
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	2	
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	2	
24	Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)	10	
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	2	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	

	Daerah (Kesbangpol)		
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2	
28	Sekretariat Daerah	2	
29	Sekretariat Dewan	2	
30	Inspektorat	10	
31	Kecamatan	17	

- b. PENERIMA MANFAAT TIDAK LANGSUNG
- DPRD KABUPATEN NATUNA (20 Arang)
 - Auditor BPK
 - Rekanan
 - Masyarakat

B. DASBOARD SISTEM



C. GRAFIK PROGRES PENYELESAIAN TEMUAN

